

TAMBANG, DEGRADASI LINGKUNGAN, DAN ELIT PEMERINTAHAN: PERSPEKTIF KEBENCANAAN (STUDI KASUS TAMBANG SEMEN TONASA PANGKEP SULAWESI SELATAN) 1916027153

Harifuddin¹, Andi Burchanuddin², Iskandar³, Ansurlawarlin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bosowa

¹harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id,

²burchanuddin@universitasbosowa.ac.id, ³Iskandar@universitasbosowa.ac.id,

⁴ansurlawarlin@universitasbosowa.ac.id

ABSTRAK

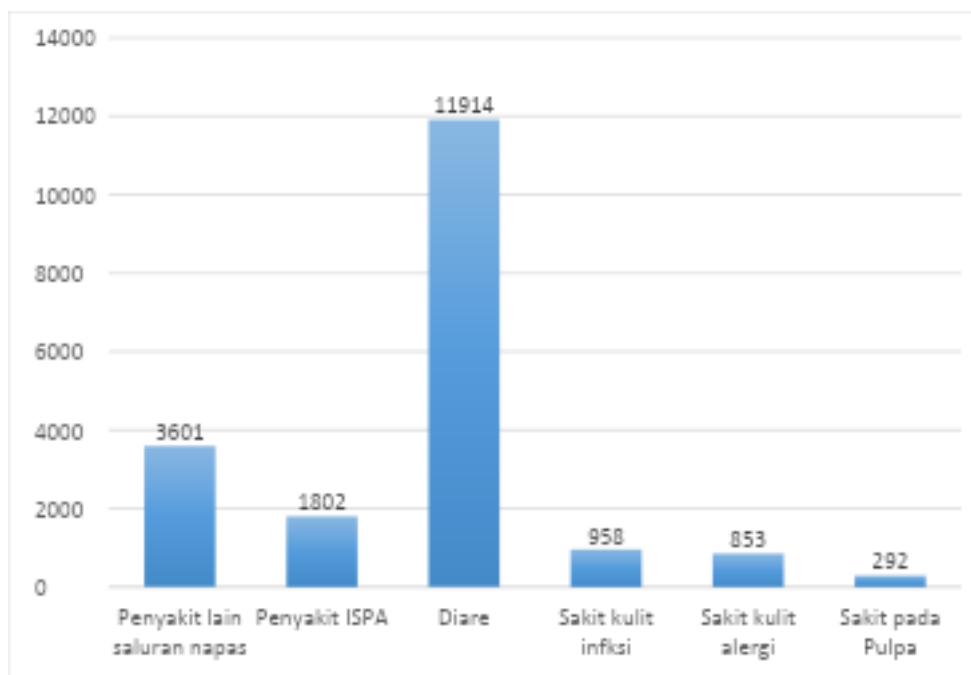
Ada relasi yang kuat antara pertambangan, degradasi lingkungan, bencana, elit pemerintahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan elit desa dalam industri pertambangan semen yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan bencana. Penelitian ini menggunakan kualitatif dalam memahami studi ekologi politik pertambangan semen di Desa Mangilu. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam sedangkan analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif teknik 3 langkah; kategorisasi, reduksi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Elit desa memainkan peran aktif dalam pemberian izin pertambangan. (2) Lokasi pertambangan otomatis terjadi degradasi lingkungan dan menimbulkan bencana. Bencana yang ditimbulkan berupa banjir, kekeringan pada daerah sekitarnya. (3) Terjadinya ketimpangan ekonomi di mana elit memperoleh keuntungan ekonomi karena pemberian izin yang dipermudah sehingga perusahaan tambang memberikan kompensasi yang banyak tapi tidak merata distribusinya. (4) Masyarakat mengadakan perlawanan secara simbolik maupun terbuka dengan cara menuntut kompensasi dana CSR yang besar tetapi posisi mereka tidak kuat akibat dominasi elit desa. Kesimpulan penelitian bencana merupakan fenomena yang dikonstruksi melalui relasi entitas sosial yang berkolaborasi baik elit desa, perusahaan dan kelompok kepentingan yang hanya memikirkan kepentingan ekonomi mereka terutama elite desa yang mendominasi kekuasaan langsung atas masyarakat desa.

Kata kunci: Degradasi lingkungan, Kebencanaan, Elit pemerintahan, Tambang.

A. PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan di wilayah pedesaan Indonesia tidak hanya membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap degradasi lingkungan yang semakin memperbesar risiko bencana. Dalam kerangka perspektif kebencanaan (*disaster perspective*), bencana tidak dipandang semata sebagai peristiwa alamiah, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan, tata kelola, dan relasi kuasa yang timpang (Wisner et al., 2004; Anriani HB, et al 2023). Oleh karena itu, keterlibatan elit desa dalam proyek pertambangan perlu dikaji secara kritis karena mereka memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dilindungi atau justru dibiarkan rentan terhadap dampak lingkungan yang mengarah pada bencana. Data berikut ini memperlihatkan dampak tersebut secara tidak langsung:

Figure 1. Preferensi penyakit dan kerusakan lingkungan akibat asap pabrik semen (Kamaruddin, 2024)



Pertambangan terbuka, terutama di sektor batubara dan nikel, telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, perubahan tata guna lahan, serta kerusakan struktur geologi wilayah. Dampak-dampak ini secara kumulatif meningkatkan potensi banjir, longsor, dan kekeringan. Namun, sering kali bencana tersebut tidak dianggap sebagai konsekuensi dari pembangunan yang eksploitatif, melainkan dimaknai sebagai kejadian "alamiah" semata. Padahal, "bencana adalah hasil dari akumulasi risiko yang dibentuk oleh kerentanan sosial"

(Wisner et al., 2004: 11). Dalam konteks ini, peran elit desa menjadi penting karena mereka memiliki posisi strategis dalam mengarahkan keputusan kolektif mengenai eksploitasi sumber daya, termasuk dalam menyetujui konsesi tambang di wilayah mereka. Di Lokasi juga Masyarakat tidak terganggu aktivitas ekonominya.

Elit desa tidak selalu memainkan peran sebagai pelindung masyarakat dari risiko bencana. Dalam banyak kasus, mereka justru menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang menguntungkan korporasi tambang dan pemerintah daerah, dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis dan keselamatan komunitasnya sendiri. Lund dan Rachman (2021) menyebut fenomena ini sebagai bentuk “*brokerage of legitimacy*,” di mana elit lokal menjadi perantara dalam melegitimasi proyek-proyek ekstraktif yang destruktif secara ekologis. Proses ini tidak hanya melemahkan kontrol masyarakat terhadap ruang hidup mereka, tetapi juga menambah lapisan kerentanan yang memperbesar dampak bencana ketika krisis ekologis terjadi.

Dari perspektif kebencanaan, degradasi lingkungan akibat tambang bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga masalah sosial-politik. Sistem sosial yang tidak adil, lemahnya partisipasi warga, dan dominasi elit dalam pengambilan keputusan menciptakan situasi yang disebut sebagai *chronic disaster vulnerability*—kerentanan struktural yang berlangsung lama dan memperparah setiap kejadian ekstrem (Bankoff et al., 2004). Oleh karena itu, memahami bagaimana elit desa berperan dalam proses produksi risiko menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) yang lebih efektif dan berbasis keadilan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis bagaimana keterlibatan elit desa dalam industri tambang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan pembentukan risiko bencana. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik dan sosiologi kebencanaan, tulisan ini menelusuri bagaimana keputusan ekonomi dan politik di tingkat lokal berdampak langsung pada kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologis, serta bagaimana narasi pembangunan sering kali menutupi realitas risiko yang semakin kompleks.

B. METODE PENELITIAN

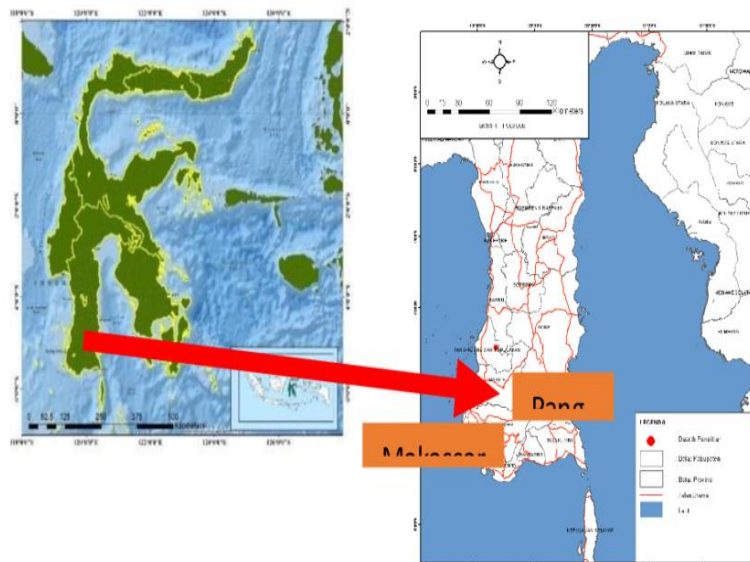
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika sosial-politik dan ekologis di Desa Mangilu, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Studi ini menyoroti bagaimana

keterlibatan elit desa dalam aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan pembentukan risiko kebencanaan bagi masyarakat lokal.

1. Lokasi Penelitian

Desa Mangilu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu desa yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan batu kapur dan semen, yang dilakukan oleh perusahaan besar yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama. Desa ini memiliki karakteristik sosial dan ekologis yang khas berupa pegunungan karst serta telah mengalami perubahan signifikan dalam tata ruang, pola mata pencaharian, dan intensitas bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan musiman.

Figure 2. Research Site (Google map, 2025)



2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

- **Elit desa:** kepala desa, yang terlibat atau memiliki pengaruh dalam proses perizinan dan sosialisasi tambang 1 orang.
- **Warga terdampak:** petani padi sawah, petani jeruk, dan ibu rumah tangga yang mengalami langsung dampak degradasi lingkungan masing-masing 1 orang.
- **Aktifis/LSM lokal:** pihak-pihak yang melakukan advokasi atau pengawasan terhadap dampak pertambangan masing-masing 1 orang.
- **Pihak Perusahaan:** sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif dari sisi kebijakan dan industry masing-masing 1 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama:

1. **Wawancara mendalam** (*in-depth interviews*): dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan posisi para informan terkait aktivitas tambang dan dampaknya terhadap lingkungan dan kerentanan bencana.
2. **Observasi partisipatif**: peneliti melakukan observasi langsung di lokasi tambang, area pemukiman, lahan pertanian, dan fasilitas publik untuk mencermati dampak lingkungan dan respons masyarakat.
3. **Studi dokumentasi**: berupa pengumpulan data sekunder seperti dokumen perizinan tambang, laporan lingkungan hidup, berita lokal, peta wilayah, serta arsip desa dan kabupaten.
4. **Pemetaan partisipatif** (*participatory mapping*): digunakan untuk mengidentifikasi secara visual wilayah-wilayah terdampak, zona rawan bencana, dan perubahan tata guna lahan menurut warga.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan **analisis 3 langkah yaitu reduksi data, kategorisasi, dan kesimpulan**. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkodean data, pengelompokan tema utama (misalnya: peran elit, dampak lingkungan, respons terhadap bencana), dan interpretasi berdasarkan kerangka teoritis ekologi politik dan sosiologi kebencanaan.

5. Validitas dan Keabsahan Data

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, konfirmasi data kepada informan (*member checking*), serta diskusi dengan pakar atau sesama peneliti. Keabsahan kontekstual diperkuat dengan keterlibatan peneliti di lapangan secara langsung untuk memahami konteks sosial dan ekologis setempat.

C. ANALISIS DATA

Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pertambangan batu kapur dan semen di Desa Mangilu telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan struktur sosial masyarakat. Dampak tersebut bukan hanya berupa kerusakan fisik ekologis, tetapi juga peningkatan kerentanan terhadap bencana, baik dalam bentuk banjir, kekeringan, hingga

hilangnya sumber penghidupan warga. Dalam konteks ini, peran elit desa menjadi kunci dalam memediasi masuknya perusahaan tambang, dan secara langsung mempengaruhi tingkat eksposur serta kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologis.

1. Peran Elit Desa dalam Legitimasi Tambang

Temuan lapangan menunjukkan bahwa elit desa (khususnya kepala desa) memainkan peran aktif dalam proses awal masuknya perusahaan tambang. Mereka terlibat dalam sosialisasi proyek, mediasi lahan, serta menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, keterlibatan tersebut lebih bersifat transaksional dan elitis.

"Waktu itu, yang datang duluan itu orang perusahaan, langsung ke pak desa. Kami cuma dikasih tahu belakangan, katanya ini buat kemajuan kampung,"
(Wawancara, Informan 1 – Petani, 48 tahun)

"Sebagai kepala desa saat itu saya tentu memberizin karena sudah di izoinkan dari kabupaten dan kecamatan. Tidak mungkin saya menolak apalagi untuk kebaikan warga yang akan direkrut bekerja."
(Kades, Surahman)

"Tentu kami dari Perusahaan berani beroperasi setelah ada izin dari pemerintah dan Masyarakat. Ini penting karena berkaitan dengan hidup matinya mata pencaharian Masyarakat."
(Dandi, 34, staff Perusahaan)

Beberapa warga mengaku tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam proses persetujuan. Sosialisasi dilakukan terbatas, sering kali dalam bentuk formalitas yang tidak mencerminkan partisipasi aktif.

"Kami baru tahu lahan itu sudah masuk izin tambang setelah lihat alat berat masuk. Padahal itu dekat sumber air kami,"
(Wawancara, Informan 2 – Ibu rumah tangga, 37 tahun)

2. Degradasi Lingkungan dan Risiko Kebencanaan

Pertambangan yang dilakukan di sekitar kawasan perbukitan dan resapan air telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap keseimbangan ekologis. Sumber air menjadi keruh dan debit air sungai menurun drastis. Selain itu, banjir lokal menjadi lebih sering terjadi saat musim hujan.

"Dulu sungai itu bersih, sekarang kalau hujan langsung keruh dan sering meluap. Lahan saya beberapa kali gagal tanam karena banjir datang tiba-tiba,"
(Wawancara, Informan 3 – Petani, 60 tahun)

"Kami dari LSM Lingkungan memang selalu mengawasi dampak lingkungan perusahaan tambang. Umumnya, memang Perusahaan tambang menimbulkan"

*penderitaan bagi Masyarakat, makanya harus sering kali diingatkan.
(Fajar, 55 thn, aktivis LSM Lingkungan)*

Dampak lingkungan ini menciptakan situasi yang dalam perspektif kebencanaan disebut sebagai “*vulnerability creation*”, yaitu ketika kebijakan atau proyek pembangunan justru meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat lokal (Wisner et al., 2004).

3. Ketimpangan Informasi dan Kepentingan Ekonomi Elit

Elit desa memperoleh keuntungan ekonomi dari kedekatannya dengan perusahaan tambang, baik melalui pekerjaan, kontrak lahan, atau bentuk kompensasi lain. Namun, distribusi keuntungan ini sangat tidak merata.

*"Yang dekat dengan orang atas dapat proyek atau pekerjaan. Kita yang biasa-biasa ini malah jadi korban debu dan suara bising,"
(Wawancara, Informan 4 – Pemuda lokal, 28 tahun)*

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menghasilkan eksklusivitas ekologis tetapi juga *eksklusi sosial*, di mana sebagian besar warga desa tidak memiliki kuasa atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka secara langsung.

4. Respon dan Adaptasi Masyarakat

Beberapa warga mulai melakukan perlawanan simbolik maupun terbuka, seperti menolak pembukaan tambang baru atau menuntut transparansi dana CSR. Namun, posisi tawar mereka lemah akibat dominasi elit dan tidak adanya dukungan kelembagaan yang kuat.

*"Kami pernah mengadu ke kecamatan, tapi jawabannya selalu, 'itu sudah ada izinnya dari atas'. Kami serba salah,"
(Wawancara, Informan 5 – Aktivis lokal, 35 tahun)*

D. DISKUSI

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pertambangan di Desa Mangilu memperlihatkan keterkaitan erat antara dominasi elit lokal, degradasi lingkungan, dan produksi risiko bencana. Temuan-temuan ini dapat dipahami lebih dalam melalui pendekatan teori ekologi politik, sosiologi kebencanaan, dan teori elit dalam sosiologi politik.

1. Produksi Risiko sebagai Konstruksi Sosial

Sosiologi kebencanaan berangkat dari asumsi bahwa bencana bukanlah peristiwa alamiah semata, melainkan hasil dari relasi sosial yang menciptakan kondisi rentan (Wisner et al., 2004). Dalam kasus Mangilu, kegiatan pertambangan mengganggu sistem hidrologi lokal,

merusak kawasan resapan air, dan memperbesar risiko banjir. Namun, bencana ini tidak muncul dalam ruang hampa; ia diproduksi oleh keputusan politik-ekonomi yang diambil secara terpusat dan dilokalisasi melalui elit desa.

Risiko bencana bukan hanya akibat dari alam, tetapi diproduksi oleh struktur sosial yang menyingkirkan masyarakat dari pengambilan keputusan dan perlindungan ekologis.

2. Ekologi Politik dan Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Pendekatan ekologi politik menyoroti bahwa konflik lingkungan bukan hanya tentang alam dan manusia, melainkan tentang siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan penggunaan dan distribusi sumber daya (Robbins, 2012). Dalam kasus Mangilu, elit desa berperan sebagai “makelar legitimasi” (Lund & Rachman, 2021), yang menjembatani kepentingan perusahaan tambang dengan otoritas desa. Hubungan ini menciptakan ketimpangan akses terhadap lahan, air, dan ruang hidup.

Dominasi elit dalam pengelolaan sumber daya inilah yang menjadi penyebab utama eksklusivitas ekologis dan sosial yang dialami warga biasa, memperkuat gagasan ekologi politik bahwa kerusakan lingkungan selalu berpihak: sebagian diuntungkan, sebagian lainnya dirugikan.

3. Teori Elit dan Pemusatan Kekuasaan di Tingkat Lokal

Teori elit dalam sosiologi politik, dijelaskan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Di desa, elit tidak hanya menjadi aktor administratif, tetapi juga penghubung dengan kapital eksternal. Proses ini terjadi melalui mekanisme informal seperti relasi patron-klien, distribusi proyek, dan kontrol atas informasi.

Dalam penelitian ini, kepala desa dan tokoh adat diketahui menjadi perantara perusahaan untuk mengamankan izin sosial dari masyarakat. Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kekuasaan desa terintegrasi dalam struktur kekuasaan kapitalistik yang lebih luas. Elit lokal menjadi agen perpanjangan tangan dari kekuatan negara dan pasar dalam memfasilitasi ekspansi industri ekstraktif, sembari menegasikan hak ekologis warga.

4. Elit dan Bencana

Dominasi elit, degradasi lingkungan, dan minimnya kontrol sosial atas sumber daya menciptakan kerentanan struktural yang memperlemah ketahanan komunitas. Adaptasi yang

dilakukan warga sering kali bersifat individual, tidak terorganisir, dan bersifat reaktif—seperti mengalihkan mata pencaharian atau bermigrasi sementara (Burchanuddin, 2024).

Hal ini mengafirmasi argumen Bankoff et al. (2004) bahwa bencana adalah ekspresi ketidakadilan struktural yang terakumulasi, bukan peristiwa mendadak yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, risiko bencana di Mangilu harus dilihat sebagai akibat dari praktik pembangunan yang tidak adil dan eksploitatif.

Elit politik seringkali mengesahkan pembangunan di daerah rawan bencana (daerah aliran sungai, lereng curam, pesisir) untuk keuntungan ekonomi. Ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap banjir, dan longsor.

Elit politik dan elit ekonomi yang mengeksploitasi hutan, tambang, dan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (deforestasi, polusi) yang memicu bencana ekologis seperti banjir bandang dan kabut asap.

Elit birokrat dan politisi yang korup mungkin menerima suap untuk mengabaikan standar keselamatan dalam konstruksi bangunan, infrastruktur, atau industri. Akibatnya, banjir yang seharusnya tidak mematikan menjadi bencana besar karena bangunan yang runtuh atau longsor.

Kebijakan ekonomi yang didikte oleh elit dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah rawan bencana dengan infrastruktur yang buruk, membuat mereka paling rentan ketika bencana terjadi.

E. KESIMPULAN

Praktik tambang di Desa Mangilu tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan lokal dan nasional. Melalui lensa sosiologi kebencanaan, kerentanan ekologis di desa tersebut diproduksi oleh keputusan ekonomi-politik yang melibatkan elit desa sebagai aktor utama. Dengan demikian, pendekatan kebencanaan yang hanya menekankan pada respons teknis dan logistik memerlukan pendekatan struktural yang mengatasi akar ketimpangan kuasa dan akses terhadap sumber daya alam.

F. PENGAKUAN

Terimakasih pada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tak langsung hingga artikel ini diterbitkan.

G. REFERENSI

- Anriani HB, Asmirah, Harifuddin, Rasyidah Zainuddin. (2023). *Banjir, Krisis Lingkungan Dan Pembangunan: Efek Kekuasaan*. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi. ISSN: 2985-8941, hal. 220-226.
- Bankoff, G. (2004). Time is of the Essence: Disasters, Vulnerability and History1. *International Journal of Mass Emergencies & Disasters*, 22(3), 23-42. <https://doi.org/10.1177/028072700402200303>
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land Degradation and Society*. Methuen.
- Bullard, R. D. (2000). *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. Westview Press.
- Burchanuddin.A.(2024). *Elit Formal Dalam Pembangunan Masyarakat*. Solok. Media Cendekia Muslim.
- Colchester, M., et al. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia—Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Fischer, F. (2000). *Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge*. Duke University Press.
- Google map, 2025.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). Neo-liberal Reforms and liberal Consolidations: The Indonesian Paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220-241.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.
- Kamaruddin, S. (2024). *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Solok: Mitra Media Cendekia.
- Martinez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar.
- Peet, R., & Watts, M. (1996). *Liberation Ecologies: Environment, Development and Social Movements*. Routledge.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004) *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge.